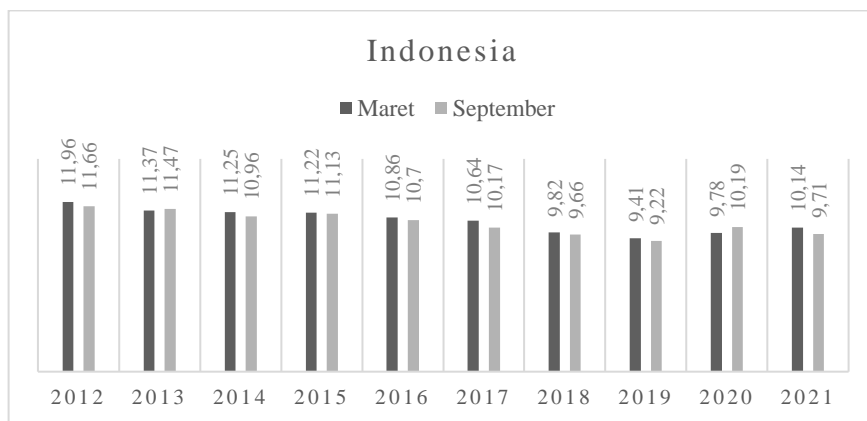


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu negara yang merupakan negara berkembang di Asia Tenggara adalah Indonesia. Negara ini memiliki ekonomi yang terus berkembang, sumber daya alam yang kaya, dan populasi yang besar. Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan atau masalah ekonomi, salah satunya adalah kemiskinan. Masalah ini merupakan masalah utama bagi sekian banyaknya negara di dunia, terutama di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai solusi melalui program untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Berikut grafik persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2021:



Sumber: BPS (2023)

Gambar 1.1
Persentase Jumlah Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2021

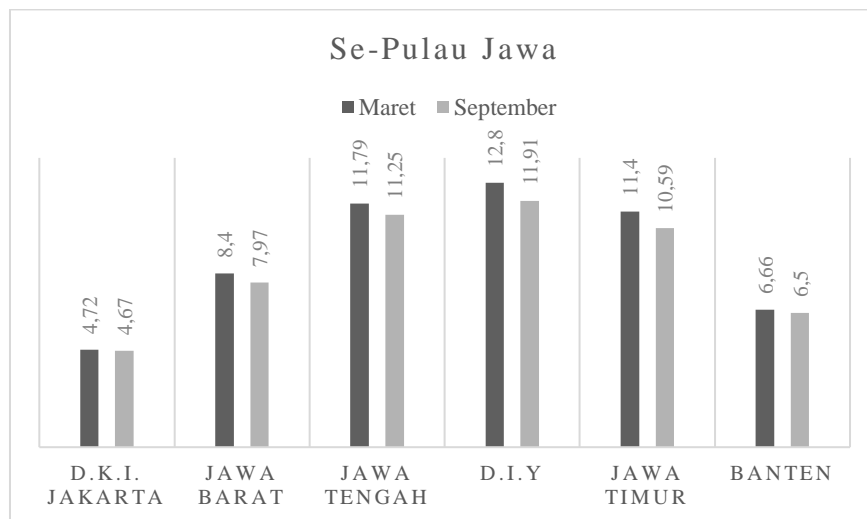
Grafik pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan 2021, persentase jumlah penduduk miskin tertinggi ada pada periode Maret tahun 2013 sebesar 11,96 persen, sedangkan persentase jumlah penduduk miskin terendah ada pada periode September tahun 2019 sebesar 9,22 persen. Adapun jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2021 (Juta Jiwa)

Tahun	Jumlah	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
2012	29,13	28,59
2013	28,06	28,55
2014	28,28	27,72
2015	28,59	28,51
2016	28,00	27,76
2017	27,77	26,58
2018	25,94	25,67
2019	25,14	24,78
2020	26,42	27,54
2021	27,54	26,50

Sumber: BPS (2023)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tabel di atas menggambarkan penurunan jumlah penduduk miskin secara garis besar walaupun tidak cukup banyak. Adanya kesenjangan antara penduduk miskin dan *non*-miskin menandakan adanya distribusi pendapatan yang tidak normal yang diakibatkan oleh adanya lonjakan penduduk dan pemusatan pembangunan di suatu wilayah atau daerah, salah satunya adalah di Pulau Jawa. Hal ini tentu menjadi masalah serius mengingat Pulau Jawa menyumbang kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah grafik jumlah persentase penduduk miskin se-Pulau Jawa pada tahun 2021:

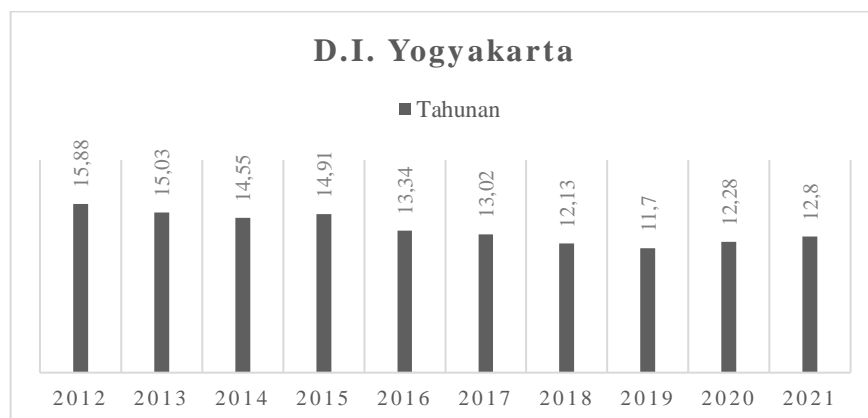


Sumber: BPS (2023)

Gambar 1.2

Persentase Jumlah Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi D.I. Yogyakarta menempati peringkat pertama di Pulau Jawa dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi sebesar 12,8 persen pada periode Maret. Angka ini sebenarnya lebih tinggi 2,66 persen dari persentase nasional. Lain halnya dengan Provinsi D.K.I. Jakarta yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin terendah di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,72 persen pada periode yang sama. Artinya adalah Provinsi D.K.I. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara mensubsidi Provinsi D.I. Yogyakarta dalam menurunkan persentase jumlah kemiskinan nasional. Berikut adalah grafik jumlah persentase kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2012 sampai dengan 2021:



Sumber: BPS (2023)

Gambar 1.3

Persentase Jumlah Kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012 – 2021

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,52 persen. Kenaikan harga bahan pokok akibat kelangkaan sembako pada pandemi Covid-19 dapat menjadi salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal itu berdampak pada data penerima bantuan yang tidak akurat yang menyebabkan bantuan dari pemerintah untuk menyediakan jaminan sosial belum tepat sasaran sehingga menyebabkan angka penurunan kemiskinan itu lambat (Luckynuari, 2019, hal. 81).

Prasada *et al.*, (2020, hal. 95) dalam studinya mengungkapkan bahwa faktor penentu tingkat kemiskinan di Pulau Jawa adalah tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, dan tingkat pengangguran terbuka sehingga seluruh faktor penentu tersebut perlu diperhatikan dengan baik untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu mengatasi kemiskinan di Pulau Jawa.

Sementara itu, peningkatan kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta tentu menjadi masalah yang serius bagi pemerintah daerah setempat sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurske (1953, hal. 97) dalam bukunya yang menyatakan bahwa kemiskinan yang tinggi didasari oleh semakin minimnya investasi pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga dapat menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan terciptanya kualitas hidup yang buruk serta menyebabkan rendahnya produktivitas.

Produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan berada di bawah tingkat minimum sehingga masyarakat miskin tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Rendahnya pendapatan dapat disebabkan oleh rendahnya gaji yang diterima pekerja akibat dari rendahnya upah minimum di suatu daerah tersebut.

Upah minimum yang terlalu rendah nantinya berdampak pada rendahnya konsumsi, tabungan, dan investasi. Salah satu komponen penting dalam permodalan adalah investasi, artinya investasi yang rendah menyebabkan kekurangan modal yang berimplikasi pada ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan ketertinggalan serta tidak menutup kemungkinan menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi.

Tingginya angka pengangguran akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga angka kemiskinan menjadi tinggi. Hal ini senada dengan Mardiatillah *et al.*, (2021, hal. 279) dalam kesimpulan penelitiannya yang mengungkapkan bahwa

pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan. Namun, hal itu berbeda dengan penelitian Rusdarti & Sebayang (2013, hal. 1) yang mengungkapkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.

Walaupun Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa, tetapi indeks kebahagiaan daerah tersebut tergolong tinggi. Hal ini tercermin pada laporan indeks kebahagiaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang dikeluarkan setiap tiga tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik, yaitu pada tahun 2014 adalah sebesar 70,77 persen (terbesar ke-4 di Indonesia dan ke-1 di Pulau Jawa), pada tahun 2017 adalah sebesar 72,93 persen (terbesar ke-8 di Indonesia dan ke-1 di Pulau Jawa), dan pada tahun 2021 adalah sebesar 71,70 persen (terbesar ke-14 di Indonesia dan ke-2 di Pulau Jawa).

Dari hasil penelitian terdahulu, diperlukan metode analisis yang berbeda, seperti analisis jalur/lintas dengan menambah variabel moderasi untuk mengetahui hubungan secara langsung dan tidak langsung pada variabel-variabel penelitian sehingga memungkinkan peneliti melakukan analisis model-model yang lebih kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh regresi linier berganda.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang “Analisis Lintas pada Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan (Studi Kasus di 5 Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta)”. Judul ini

sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk diteliti dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap bidang sosioekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta informasi sebagai dasar pertimbangan, pendukung, dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, pemerintah, dan peneliti selanjutnya tentang Indeks Pembangunan Manusia dan kemiskinan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, adalah sebagai berikut:

- B.1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta?
- B.2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta?
- B.3. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta?
- B.4. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta?

- B.5. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta?
- B.6. Apakah Indeks Pembangunan Manusia secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka penulis mengemukakan tujuan yang berkaitan dengan judul penelitian, adalah sebagai berikut:

- C.1. Untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh secara langsung Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- C.2. Untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh Produk Domestik Regional Bruto secara tidak langsung terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- C.3. Untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota secara tidak langsung terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- C.4. Untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh Pengangguran secara langsung terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

C.5. Untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh Pengangguran secara tidak langsung terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.

C.6. Untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia secara langsung terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan analisis lintas pada indeks pembangunan manusia dan kemiskinan sehingga dapat memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mencari solusi untuk masalah – masalah kompleks yang berkaitan dengan judul atau tema penelitian. Hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan, perencanaan strategis, dan implementasi solusi yang efektif. Kemudian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pembuatan kebijakan publik. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan membuat keputusan yang lebih baik.

Selain itu, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan riset, yang sangat berharga dalam

berbagai konteks profesional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ekonomi tentang analisis lintas pada indeks pembangunan manusia dan kemiskinan.